

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Burgin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Depok: Rajagrafindo Pustaka.
- Daradjat, Zakiah. 1983. *Kesehatan Mental*. Jakarta : Gunung Agung.
- Desti, Maria 2016. *Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kepada Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung : Tidak diterbitkan.
- Gaffar, Janedjri M. 2012, *Demokrasi Konstitusional*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress).
- Harrison, Lisa. 2009. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta : Kencana.
- Moleong, Lexy J.. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Panjaitan, Marojahan JS. 2018. *Politik, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi Dalam Bingkai Negara Kesejahteraan Dan Kebahagiaan Menurut UUD 1945*. Bandung : Penerbit Pustaka Reka Cipta.
- Ruslan, Rosady. 2004. *Metode Penelitian Public Relations & Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif)*. Bandung : Alfabeta.
- Soekanto, Soejono, dan Mamudji, Sri, 2006. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wignjodipuro, Surojo. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT.Gunung Agung.
- Yusuf L.N, Syamsu. 2018. *Kesehatan Mental Perspektif Psikologias Dan Agama*. Bandung : Penerbit Rosdakarya.

SUMBER INTERNET

- Anugrah Ayu. 2019. Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif pada Sebuah Tulisan Ilmiah. (Online) <https://hot.liputan6.com/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2019.
- Kementrian Sosial Republik Indonesia. Penyandang Disabilitas Mental. (Online) <http://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-mental>. Diakses pada 21 Juni 2019 pukul 21.22 WIB.
- Krisiandi. 2018. Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Disebut Lahir dari Perjuangan panjang (Online). <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/24/22573761/hak-pilih-penyandang-disabilitas-mental-disebut-lahir-dari-perjuangan>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2019.
- Pernyataan Pers PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia). 3 Desember 2018. Hak Memilih Penyandang Disabilitas Mental Harus Dijamin Negara. Publikasi Online pada laman <https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/hak-memilih-penyandang-disabilitas-mental-harus-dijamin-negara/>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2019 pukul 14.12 WIB.
- Priyo Handoko. 2019. Hak Penyandang Disabilitas Mental di Pemilu. <https://news.detik.com/kolom/d-4434312/hak-penyandang-disabilitas-mental-di-pemilu#> Diakses Pada 10 Oktober 2019.
- Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. Si. 2010. Mengenal Lebih Jauh Tentang Studi Kasus. (Online) <https://www.uin-malang.ac.id/r/100501/mengenal-lebih-jauh-tentang-studi-kasus.html>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2019.
- S, Cliffton. 2018. Hubungan Demokrasi dan Konstitusi. (Online) <https://www.kompasiana.com/clifftons1291/5bf36bc0677ffb74f552b678/hubungan-demokrasi-dan-konstitusi?page=all>. Diakses pada 14 Agustus 2019 pukul 21.45 WIB.
- <https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1065> diakses pada 25 Januari 2019 pukul 22.00 WIB.

<https://portal.tasikmalayakota.go.id/wpcontent/uploads/2018/02/GEOGRAFI.pdf>

diakses pada 26 Januari 2019 pukul 10.00 WIB.

<https://portal.tasikmalayakota.go.id/pemerintahan/visi-misi/> diakses pada 25

Januari 2019 pukul 23.00 WIB

https://www.kpu.go.id/koleksigambar/1_OK_-_SEJARAH_PEMILU_1-5.pdf

diakses 05 February 2020 pukul 15.46 WIB

<https://www.kpu.go.id/index.php/home> diakses 5 february 2020 pukul 15.03 WIB

<https://kota-tasikmalaya.kpu.go.id/kunjungi-slb-yayasan-bahagia-kpu->

[sosialisasikan-pemilu-2019/](https://kota-tasikmalaya.kpu.go.id/kunjungi-slb-yayasan-bahagia-kpu-sosialisasikan-pemilu-2019/) Diakses 05 February 2020 pukul 16.10 WIB

<https://kota-tasikmalaya.kpu.go.id/pendidikan-pemilih-bagi-penyandang->

[disabilitas/](https://kota-tasikmalaya.kpu.go.id/pendidikan-pemilih-bagi-penyandang-disabilitas/) Diakses 05 February 2020 pukul 16.22 WIB

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

JURNAL

Agus Riswanto dan Tim. 2018. Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Disabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal. Vol. 4 No. 3.

Dina Lestari. 2018. Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017. JomFisi[Vol. 5
Edisi II Juli.

Fajri Nursyamsyi dan Tim. 2015. Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia :
Menuju Indonesia Ramah Disabilitas. PSHK.

Jimly Asshiddiqie. 2004. *Konstitusi dan Konstisionalisme Indonesia*, (Jakarta:
Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak.
Hukum UI.

Rasyid Rahmat. 2020. Hak Konstitusional Bagi Penyandang Disabilitas Mental
Dalam Pemilihan Umum, Jurnal Vol 4, No 1.

Syaiful dan Rosita. 2019. Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan
Umum di Indonesia. Lentera Hukum, Vol 6 Issue 1.

Tony Rahmanto. 2019. Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau
Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Penelitian HAM Vol.10 N